

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan BAB IV mengenai sistem penggajian terhadap Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar, maka dapat disimpulkan :

1. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak hanya melibatkan satu fungsi bagian saja, tapi melibatkan beberapa fungsi seperti bagian kepegawaian, bendahara gaji, bendahara pengeluaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengguna anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat dan bank nagari.
2. Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Penggajian PNS Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar adalah dokumen pendukung perubahan gaji, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Penyediaan Dana (SPD)
3. Unsur – unsur pembentukan gaji terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan potongan-potongan.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis ingin memberikan saran. Penulis telah menggambarkan bagaimana sistem akuntansi penggajian pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Apabila pembaca atau pihak lain ingin mengetahui apakah sudah efektif sistem akuntansi penggajian yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka sebaiknya pihak lain dapat meneliti atau menguji keefektifan sistem tersebut melalui penelitian pada periode berikutnya.

